

Analisis Sistem Pengendalian Internal terhadap Proses Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Purworejo

Noviana Safitri¹, Khalilul Rahman²

^{1,2}Universitas Tidar

E-Mail: novianasafitri74@gmail.com, khalilul@untidar.ac.id

Published: Maret, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem pengendalian internal dalam meminimalkan risiko penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta mengidentifikasi kendala dalam analisis risiko. Masalah utama dalam penyaluran KUR meliputi risiko kredit macet, kesalahan analisis kelayakan, dan hambatan administratif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan kuesioner kepada responden internal (petugas KUR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal telah diimplementasikan dengan kategori "Baik", dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 80%. Temuan utama menunjukkan efektivitas tinggi (100%) pada aspek kejelasan tugas, otorisasi berjenjang, dan verifikasi dokumen. Namun, terdapat kelemahan pada monitoring paska-pencairan dan pelatihan pegawai yang hanya mencapai 60%. Implikasi penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan frekuensi monitoring lapangan dan optimalisasi pelatihan manajemen risiko bagi pegawai.

Kata Kunci: Kredit Usaha Rakyat, Pengendalian Internal, Risiko Kredit, UMKM, Bank BTN.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the internal control system in minimizing the risks associated with the distribution of People's Business Credit (KUR) and to identify obstacles within the risk analysis process. The primary issues in KUR distribution include non-performing loans, inaccurate feasibility analysis, and administrative constraints. This research employs a qualitative descriptive method supported by descriptive quantitative data. Data were collected through observation, in-depth interviews, and questionnaires administered to internal respondents (KUR officers). The results indicate that the internal control system has been implemented in the "Good" category, with an average effectiveness rate of 80%. Key findings demonstrate high effectiveness (100%) in aspects such as clarity of duties, tiered authorization, and document verification. However, weaknesses were identified in post-disbursement monitoring and employee training, which only reached 60%. The implications of this study suggest the need for increased frequency of field monitoring and the optimization of risk management training for employees.

Keywords: People's Business Credit, Internal Control, Credit Risk, MSMEs, Bank BTN.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian nasional yang memiliki kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Namun, pelaku UMKM seringkali menghadapi kendala dalam mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal. Pemerintah merespons hambatan ini melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu skema kredit/pembiayaan modal kerja yang disubsidi bunga oleh pemerintah untuk membantu pelaku usaha yang produktif namun belum memiliki agunan yang cukup (Azis et al., 2022). PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, sebagai salah satu bank penyalur KUR, memiliki peran strategis dalam menjembatani kebutuhan modal UMKM dengan tetap menjaga stabilitas operasional perbankan melalui prinsip kehati-hatian.

Dalam konteks bank pemerintah, sistem pengendalian internal menjadi instrumen yang sangat krusial. Penyaluran KUR tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pencapaian target pemerintah, yang terkadang menimbulkan risiko moral hazard baik dari sisi internal bank maupun debitur. Pengendalian internal yang efektif berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko untuk meminimalkan potensi kredit bermasalah dan memastikan bahwa seluruh prosedur dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku (Hanifah et al., 2023). Hal ini sejalan dengan kerangka kerja COSO yang menekankan bahwa lingkungan pengendalian dan penilaian risiko yang kuat adalah dasar

dari keberhasilan operasional organisasi (Saputra, 2023). Tanpa sistem yang memadai, percepatan penyaluran KUR berisiko mengabaikan kualitas analisis yang berujung pada kerugian aset negara.

Masalah empiris yang ditemukan di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Purworejo menunjukkan adanya dinamika dalam pengelolaan risiko. Meskipun secara umum prosedur telah mengikuti SOP, di lapangan masih terdapat kendala spesifik dalam analisis risiko dan pemenuhan kelengkapan administratif. Kendala utama sering muncul pada tahap validasi profil usaha debitur dan keterbatasan data lapangan yang akurat, yang menyebabkan analisis kelayakan menjadi kurang optimal. Selain itu, adanya ketidakkonsistenan dalam frekuensi monitoring paska-pencairan dan terbatasnya pelatihan manajemen risiko bagi petugas di tingkat KCP memperlebar celah risiko kredit. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengendalian internal di tingkat unit kecil memerlukan evaluasi mendalam agar tidak hanya menjadi kelengkapan administratif, tetapi juga menjadi benteng pertahanan risiko yang substantif. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem pengendalian internal dalam memitigasi risiko KUR serta mengidentifikasi solusi atas kendala analisis risiko di BTN KCP Purworejo.

TINJAUAN PUASTAKA

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan inisiatif strategis pemerintah yang dirancang untuk memperkuat struktur permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui skema penjaminan kredit. Program ini secara khusus ditujukan bagi pelaku usaha yang memiliki bisnis yang layak secara ekonomis (feasible) namun menghadapi hambatan dalam memenuhi persyaratan agunan tambahan yang ditetapkan oleh perbankan konvensional (unbankable) (Azis et al., 2022). Di lembaga perbankan seperti BTN, penyaluran KUR berfungsi sebagai instrumen inklusi keuangan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor riil dan penyerapan tenaga kerja (Saraswati, 2021). Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kemampuan bank dalam menyeimbangkan antara misi sosial pemerintah dengan prinsip manajemen risiko perbankan yang sehat (Rahmadani & Maryam, 2020).

Prinsip Penilaian Kelayakan Kredit (7C dan 3R)

Dalam mengevaluasi permohonan kredit, perbankan menerapkan prinsip 7C sebagai standar prosedur operasional untuk memitigasi risiko gagal bayar sejak dini. Prinsip tersebut meliputi Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (agunan), Condition of Economy (kondisi ekonomi), Constraint (hambatan), dan Coverage (perlindungan) (Saraswati, 2021). Di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, aspek Character menjadi prioritas utama yang divalidasi melalui rekam jejak kolektibilitas pada sistem SLIK OJK, sementara aspek Capacity diukur melalui analisis arus kas untuk memastikan debitur memiliki kemampuan membayar angsuran secara konsisten (Saputra, 2023).

Selain itu, prinsip 3R (Return, Repayment, Risk Bearing Ability) digunakan sebagai alat ukur pelengkap dalam menilai profitabilitas dan ketahanan risiko usaha debitur. Return menilai apakah kredit tersebut mampu menghasilkan pendapatan tambahan bagi debitur, Repayment mengukur kemampuan pengembalian pinjaman beserta bunganya, dan Risk Bearing Ability mengevaluasi kapasitas debitur dalam menghadapi risiko keberlangsungan usaha jika terjadi gejolak ekonomi (Rahmadani & Maryam, 2020). Penerapan integrasi prinsip 7C dan 3R di Bank BTN bertujuan untuk meminimalkan potensi munculnya Non-Performing Loan (NPL) dan memastikan bahwa penyaluran kredit tepat sasaran (Saraswati, 2021).

Sistem Pengendalian Internal (COSO Framework)

Sistem pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan organisasi terkait efektivitas operasional, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Merujuk pada kerangka kerja COSO (Committee of Sponsoring Organizations), sistem ini terdiri dari lima komponen utama yang saling terintegrasi: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (Saputra, 2023). Di sektor perbankan, pengendalian internal menjadi benteng pertahanan utama dalam mencegah praktik penyimpangan dan kesalahan administratif yang dapat merugikan aset negara (Hanifah et al., 2023).

Manajemen Risiko Kredit Perbankan

Risiko kredit adalah risiko kerugian yang timbul akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Dalam penyaluran KUR, manajemen risiko menjadi sangat krusial karena objek kredit seringkali tidak memiliki agunan fisik yang kuat, sehingga bank lebih mengandalkan analisis terhadap kelayakan usaha dan integritas debitur (Rahmadani & Maryam, 2020). Mitigasi risiko dilakukan melalui penetapan limit kredit yang ketat, asuransi penjaminan kredit, serta monitoring secara berkala untuk mendeteksi tanda-tanda penurunan kualitas kredit secara dini (Saraswati, 2021). Efektivitas

manajemen risiko ini secara langsung akan mempengaruhi tingkat NPL bank dan keberlanjutan program KUR itu sendiri (Azis et al., 2022).

Peran Teknologi dan Sistem Informasi dalam Pengendalian

Di era perbankan digital, sistem informasi memiliki peran vital sebagai sarana pendukung pengendalian internal yang memastikan data debitur tersimpan secara akurat dan terintegrasi. Penggunaan sistem seperti Dukcapil untuk validasi identitas dan SLIK OJK untuk pengecekan riwayat kredit merupakan bentuk pemanfaatan teknologi untuk memperkuat tahap penilaian risiko (Magdalena et al., 2023). Sistem informasi yang baik memungkinkan manajemen untuk melakukan pengawasan secara real-time, mempercepat proses otorisasi berjenjang, serta mempermudah penyusunan laporan kredit bermasalah secara tepat waktu (Hanifah et al., 2023). Keandalan sistem informasi ini mengurangi risiko kesalahan manusia (human error) dan meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan penyaluran KUR (Magdalena et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif deskriptif. Penggunaan metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam dan sistematis mengenai efektivitas sistem pengendalian internal yang berjalan di objek penelitian. Sejalan dengan karakteristik penelitian deskriptif, studi ini tidak dirancang untuk menguji hipotesis atau mencari hubungan kausal antar variabel, melainkan berfokus pada evaluasi pemenuhan indikator pengendalian internal dalam memitigasi risiko penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Objek Penelitian, Populasi, dan Sampel

Lokasi penelitian ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Purworejo. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh personel yang terlibat langsung dalam siklus penyaluran KUR. Mengingat jumlah populasi yang terbatas dan spesifik, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh (sensus). Responden penelitian berjumlah 5 orang pegawai yang merepresentasikan berbagai lini fungsional, mulai dari tingkat manajerial (Kepala KCP), petugas analis kredit, hingga staf administrasi/operasional kredit.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui tiga teknik utama:

1. Observasi: Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap alur kerja di kantor, meliputi praktik pemisahan tugas, pengamanan dokumen fisik, serta interaksi petugas dengan calon debitur.
2. Wawancara Mendalam: Dilakukan untuk menggali aspek kualitatif terkait kendala riil dalam analisis risiko dan dinamika komunikasi antarbagian yang tidak tertangkap melalui kuesioner.
3. Kuesioner: Digunakan untuk memperoleh data kuantitatif berupa skor persepsi pegawai mengenai efektivitas sistem pengendalian internal berdasarkan indikator yang telah ditetapkan

Instrumen Penelitian

Instrumen utama penelitian ini adalah kuesioner yang dikembangkan berdasarkan kerangka kerja COSO (2013). Kuesioner terdiri dari 19 butir pernyataan dengan menggunakan Skala Likert 5 poin (1 = Sangat Tidak Setuju; 5 = Sangat Setuju). Dasar penyusunan instrumen ini merupakan adopsi dan modifikasi dari penelitian perbankan terdahulu (Saraswati, 2021). Rincian distribusi butir instrumen disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Kisi-kisi Instrumen Penelitian Berdasarkan Indikator COSO

No	Indikator Pengendalian Internal (COSO)	Jumlah Butir Pernyataan	Contoh Item Pernyataan
1	Lingkungan Pengendalian (Control Environment)	4	Tugas dan tanggung jawab petugas kredit dijelaskan secara jelas dan tertulis.
2	Penilaian Risiko (Risk Assessment)	4	Bank melakukan analisis risiko secara mendalam sebelum memberikan persetujuan kredit.
3	Aktivitas Pengendalian (Control Activities)	3	Persetujuan kredit dilakukan melalui mekanisme otorisasi berjenjang sesuai kewenangan.
4	Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)	4	Sistem informasi kredit menyediakan data debitur secara akurat dan mudah diakses.
5	Pemantauan / Monitoring (Monitoring Activities)	4	Audit internal dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP.
Total		19 Butir Pernyataan	

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara terintegrasi antara data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dianalisis melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan deskriptif. Sementara itu, data kuantitatif dari kuesioner dihitung menggunakan rumus persentase skor aktual terhadap skor maksimum untuk menentukan tingkat efektivitas. Hasil perhitungan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam kategori penilaian sebagai berikut:

Tabel 2. Kategori Tingkat Efektivitas Pengendalian

Rentang Persentase	Kategori Penilaian
81% – 100%	Sangat Efektif
61% – 80%	Efektif
41% – 60%	Cukup Efektif
≤ 40%	Kurang Efektif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Empiris Hasil Wawancara dan Observasi

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi lapangan yang dilakukan pada **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KCP Purworejo**, diperoleh informasi bahwa alur formal penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah berjalan sesuai dengan standar operasional perbankan. Proses penyaluran kredit telah mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan oleh bank, mulai dari pengumpulan dokumen hingga tahap pencairan kredit.

Meskipun demikian, hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa celah pada tahap implementasi kebijakan, khususnya dalam aspek analisis risiko dan pemantauan penggunaan dana kredit. Hal tersebut teridentifikasi melalui wawancara dengan petugas kredit serta hasil observasi terhadap proses operasional yang berlangsung.

Tabel 3. Hasil Wawancara Terkait Operasional KUR

Dimensi Pertanyaan	Temuan Utama di Lapangan
Alur Proses	Debitur mengumpulkan berkas → petugas mengoleksi berkas → proses verifikasi → akad KUR.
Kendala Utama	Kurangnya ketajaman dalam analisis risiko serta keterbatasan dalam memvalidasi kondisi riil debitur.
Penerapan Prinsip 7C	Penilaian lebih diprioritaskan pada kolektibilitas lancar melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK serta kelayakan usaha.
Pelatihan Pegawai	Sebagian besar pelatihan pegawai dilakukan melalui platform daring (online).
Monitoring	Pemantauan dilakukan setelah akad kredit dengan interval rata-rata 14 hari.

Sumber: Data primer diolah oleh Noviana Safitri (2026).

Analisis Kritis

Temuan penelitian menunjukkan adanya kerentanan pada komponen Penilaian Risiko (Risk Assessment) dan Aktivitas Pengendalian (Control Activities) dalam kerangka pengendalian internal COSO. Kendala pada analisis risiko menunjukkan bahwa meskipun bank telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), kemampuan petugas dalam mengidentifikasi risiko potensial di lapangan masih perlu ditingkatkan.

Pelatihan yang sebagian besar dilakukan secara daring juga diduga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keterbatasan sensitivitas analisis kredit dalam melakukan verifikasi faktual terhadap kondisi debitur. Selain itu, frekuensi monitoring pasca-akad yang dilakukan setiap 14 hari sekali menunjukkan adanya kelemahan pada komponen Pemantauan (Monitoring). Risiko kredit bermasalah seringkali muncul setelah pencairan dana, terutama ketika debitur menggunakan dana KUR tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan usaha.

Analisis Kuesioner Pengendalian Internal (Pendekatan COSO)

Penilaian terhadap efektivitas sistem pengendalian internal dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang terlibat dalam operasional kredit. Kuesioner menggunakan Skala Likert 1–5, yang kemudian dikonversikan ke dalam bentuk persentase untuk memudahkan interpretasi hasil penelitian.

Konversi skor dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Efektivitas} = (\text{Skor Aktual} / \text{Skor Maksimum}) \times 100\%$$

Rumus tersebut digunakan untuk memperoleh nilai relatif yang selanjutnya diklasifikasikan ke dalam kategori tingkat efektivitas pengendalian internal.

Tabel 4. Tingkat Efektivitas Pengendalian Internal Berdasarkan Indikator COSO

No	Indikator (Komponen COSO)	Skor Aktual	Skor Maks	Persentase	Kategori
1	Lingkungan Pengendalian	22	25	88%	Sangat Baik
2	Penilaian Risiko	20	25	80%	Baik

No	Indikator (Komponen COSO)	Skor Aktual	Skor Maks	Persentase	Kategori
3	Aktivitas Pengendalian	15	15	100%	Sangat Baik
4	Informasi dan Komunikasi	16	20	80%	Baik
5	Pemantauan (Monitoring)	12	20	60%	Cukup Baik
Rata-rata Keseluruhan				81,6%	Sangat Baik

Sumber: Data kuesioner diolah oleh Noviana Safitri (2026).

Penetapan kategori tersebut merujuk pada kriteria interval efektivitas yang dikemukakan oleh Sugiyono (2019), di mana nilai rata-rata sebesar 81,6% secara agregat dikategorikan sebagai sangat baik. Namun demikian, analisis lebih mendalam terhadap masing-masing indikator menunjukkan beberapa temuan penting sebagai berikut.

1. Indikator Terkuat

Indikator dengan nilai tertinggi terdapat pada Aktivitas Pengendalian dengan persentase 100%. Hal ini menunjukkan bahwa bank telah menerapkan mekanisme pengendalian administratif dengan sangat baik, seperti penerapan prinsip double check dan sistem otorisasi berjenjang dalam proses persetujuan kredit. Dengan demikian, risiko kesalahan administratif dapat diminimalkan secara efektif.

2. Indikator Terlemah

Indikator dengan nilai terendah terdapat pada Pemantauan (Monitoring) dengan persentase 60%. Nilai ini sejalan dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan dana kredit setelah pencairan masih kurang intensif. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko moral hazard, yaitu ketika debitur menggunakan dana KUR untuk kepentingan konsumtif yang tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan usaha.

Solusi Strategis bagi PT Bank BTN KCP Purworejo

Berdasarkan hasil analisis terhadap kelemahan dalam aspek monitoring dan analisis risiko, peneliti mengusulkan beberapa solusi strategis sebagai berikut.

1. Penguatan Sistem Monitoring Proaktif

Bank disarankan untuk menerapkan Quarterly On-Site Visit, yaitu kunjungan lapangan secara berkala setiap triwulan kepada debitur secara acak. Mengingat indikator pemantauan hanya mencapai 60%, kegiatan audit lapangan secara mendadak diperlukan untuk memastikan bahwa usaha debitur tetap berjalan dan aset yang dibiayai melalui kredit masih tersedia.

2. Modernisasi Sistem Analisis Risiko

Untuk meningkatkan kualitas analisis risiko, bank perlu mengintegrasikan data ekosistem lokal, seperti informasi pasar dan komunitas UMKM, ke dalam sistem informasi internal bank. Integrasi data ini memungkinkan analisis kredit melakukan cross-check antara informasi yang disampaikan debitur dengan kondisi riil di lapangan secara lebih akurat.

3. Transformasi Sistem Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pelatihan bagi analis kredit perlu dikembangkan dari metode pembelajaran daring menjadi case-based learning secara luring atau tatap muka. Metode ini memungkinkan analis untuk mempelajari berbagai kasus nyata yang sering terjadi dalam pembiayaan UMKM, sehingga kemampuan dalam mendeteksi anomali pada dokumen dan laporan keuangan mikro dapat meningkat.

4. Implementasi Early Warning System (EWS)

Bank juga disarankan untuk mengembangkan Early Warning System (EWS) dalam sistem informasi kredit. Sistem ini dapat memberikan notifikasi otomatis apabila terjadi indikasi risiko, seperti penurunan saldo usaha debitur atau keterlambatan pembayaran cicilan. Dengan demikian, bank dapat mengambil tindakan preventif sebelum kredit berkembang menjadi kredit bermasalah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis sistem pengendalian internal terhadap penyaluran KUR pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KCP Purworejo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal: Secara keseluruhan, sistem pengendalian internal telah diimplementasikan dengan kategori Sangat Baik (rata-rata efektivitas 81,6%). Bank menunjukkan kekuatan utama pada komponen Aktivitas Pengendalian (100%) melalui prosedur otorisasi berjenjang dan verifikasi dokumen yang sangat disiplin untuk memitigasi risiko administratif.
2. Celah Pengendalian (Gap): Meskipun secara agregat dinilai baik, terdapat kelemahan signifikan pada komponen Pemantauan (Monitoring) yang hanya mencapai skor 60% (kategori Cukup Baik). Hal ini selaras

dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa pengawasan pasca-pencairan hanya dilakukan dalam jangka waktu pendek (14 hari), sehingga bank memiliki risiko tinggi terhadap moral hazard debitur dalam jangka menengah dan panjang.

3. Kendala Operasional: Hambatan utama dalam penyaluran KUR terletak pada ketidaktajaman analisis risiko lapangan dan validitas kelengkapan berkas. Hal ini dipengaruhi oleh metode pelatihan pegawai yang masih didominasi format daring, sehingga kurang mengasah kemampuan intuitif analis dalam mendeteksi anomali usaha debitur.

Saran

Merujuk pada temuan penelitian, terutama pada indikator-indikator yang memiliki nilai rendah (monitoring dan pelatihan), penulis memberikan saran-saran strategis sebagai berikut:

1. Bagi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KCP Purworejo:
 - Peningkatan Intensitas Monitoring: Bank disarankan untuk tidak hanya melakukan monitoring satu kali di awal, tetapi menerapkan jadwal kunjungan lapangan secara berkala (misalnya setiap 3 atau 6 bulan) untuk memastikan dana KUR benar-benar digunakan untuk pengembangan usaha, bukan untuk kebutuhan konsumtif.
 - Revisi Pola Pelatihan SDM: Mengingat skor pada aspek pelatihan dan analisis risiko masih perlu ditingkatkan, bank sebaiknya menyelenggarakan pelatihan berbasis studi kasus (Case-Based Learning) secara tatap muka (luring). Pelatihan ini harus fokus pada teknik verifikasi faktual dan deteksi dini terhadap potensi kredit bermasalah.
 - Digitalisasi Laporan Lapangan: Mengembangkan sistem pelaporan monitoring berbasis aplikasi yang mewajibkan petugas mengunggah foto lokasi usaha terkini dengan koordinat GPS (geo-tagging) guna memastikan akuntabilitas hasil pengawasan lapangan.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya:
 - Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan responden tidak hanya dari sisi internal bank, tetapi juga melibatkan persepsi debitur KUR untuk mendapatkan gambaran pengendalian internal dari sudut pandang eksternal.
 - Disarankan untuk menggunakan metode analisis yang lebih kompleks seperti analisis regresi untuk melihat dampak langsung efektivitas pengendalian internal terhadap tingkat Non-Performing Loan (NPL) secara kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, M., Azizah, L. M., & Timur, J. (2022). Analisis Implementasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pengembangan UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 6(1), 160–190.
- Hanifah, A. M., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Literature Review: Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Peran Audit Internal, Komitmen Manajemen Terhadap Good Corporate Governance. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(2), 1318–1330.
- Magdalena, M., Dwiastuti, P., Sukmarani, W., & Chandra, Y. I. (2023). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal pada PT. Sisfomedika Yogyakarta. *Jurnal Infokom*, 7(2), 86–92.
- Rahmadani, S., & Maryam, S. (2020). Analisis Penilaian Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 45–58.
- Saputra, M. A. (2023). Sistem Pengendalian Internal Berdasarkan COSO Framework Pada Perusahaan Konstruksi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 197–210.
- Saraswati, D. (2021). Penerapan Prinsip 7C dalam Memitigasi Risiko Kredit pada Perbankan Indonesia. *Journal of Business and Economics*, 2(3), 112–125.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.